

ISSN 1411-9900

Jurnal EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan

Muchamad Zaenuri

**Preferensi Masyarakat pada Komoditas Elektronik Asal Cina
Pasca Pemberlakuan CAFTA 2010**

Rakhmat Priyono

Pengukuran Risiko Penyaluran Kredit di Bank Perkreditan Rakyat

Ardito Bhinadi

Survei Indeks Kepuasan Konsumen atas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Agus Tri Basuki

**Perkembangan Industri di Daerah Pascakrisis Ekonomi 1998:
Deindustrialisasi dan Penyebabnya**

Abdul Aziz Ahmad

Kesenjangan Investasi Domestik dalam Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

Imamudin Yuliadi

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota

Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana

Peranan Kenaikan Harga Gabah dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2008

Anda Triyanto dan Didi Nuryadin

Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Volume 12

Nomor 1

Halaman
1 - 112

Yogyakarta
April 2011

ISSN
1411-9900

Jurnal

ISSN 1411-9900

EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

Pimpinan Penyunting / Editor in Chief
Endah Saptutyingsih

Penyunting Pelaksana / Executive Editor
Ahmad Ma'ruf

Sekretaris / Secretary
Hudiyanto

Dewan Penyunting / Editorial Board

Jaka Sriyana	(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Ahmad Jamli	(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Lukman Hakim Hasan	(Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Raditya Sukmana	(Universitas Airlangga Surabaya)
Agus Tri Basuki	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Lilies Setiartiti	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Nano Prawoto	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Imamuddin Yuliadi	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Masyhudi Muqorobin	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Administrasi / Administration
Samsul Bahri

Sirkulasi / Circulation
Dewi Iriani

Periode terbit
2 kali setahun pada bulan April dan Oktober

Terbit pertama kali
April 2000

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan hasil penelitian dan kajian teoritis mengenai masalah-masalah ekonomi dan studi pembangunan, khususnya di Indonesia. Diterbitkan oleh Unit Penerbit Fakultas Ekonomi (UPFE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dewan Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan atau diproses terbit oleh media lain. Tulisan yang dikirimkan menggunakan format penulisan seperti yang tercantum pada lembar pedoman penulisan jurnal di halaman belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format dan tata cara lainnya. Naskah dikirim ke alamat penyunting.

Alamat Penyunting: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp. (0274) 387656 pes 184, Fax. (0274) 387646 *E-mail:* jesp@umy.ac.id *Website:* <http://jurnal.umy.ac.id>

Jurnal

ISSN 1411-9900

EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Penyunting	ii
Penyusunan Indikator dan Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan <i>Muchamad Zaenuri</i>	1-12
Preferensi Masyarakat pada Komoditas Elektronik Asal Cina Pasca Pemberlakuan CAFTA 2010 <i>Rakhmat Priyono</i>	13-26
Pengukuran Risiko Penyaluran Kredit di Bank Perkreditan Rakyat <i>Ardito Bhinadi</i>	27-37
Survei Indeks Kepuasan Konsumen atas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah <i>Agus Tri Basuki</i>	38-50
Perkembangan Industri di Daerah Pascakrisis Ekonomi 1998: Deindustrialisasi dan Penyebabnya <i>Abdul Aziz Ahmad</i>	51-64
Kesenjangan Investasi Domestik dalam Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah <i>Imamudin Yuliadi</i>	65-75
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota <i>Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana</i>	76-89
Peranan Kenaikan Harga Gabah di Indonesia Tahun 2008 <i>Anda Triyanto dan Didi Nuryadin</i>	90-112

KESENJANGAN INVESTASI DOMESTIK DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

Imamudin Yuliadi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, Telepon: +62-274-387656
E-mail: imamudin2006@yahoo.co.id

Abstract: Decentralization policy make several positive impact in regional economy. Papua province is one district that employs a decentralization policy. The objective of this research is to know the growing of foreign and domestic investment among province in Indonesia. And others to identify how far the foreign and domestic disparity investment among province in Indonesia and what the factor that caused its disparity. Research method that applied is descriptive analysis and trend analysis, regression analysis and foreign and domestic disparity investment among province in Indonesia. The conclusion of this study is that there is a big difference between Java and Sumatra investment with the rest of Indonesia. Disparity investment is also caused by disparity economic infrastructure among region in Indonesia. The suggestion of these research to promote equality of development is how create the conducive circumstance with comprehensive economic policy and also support with social politic stability, sufficiently of economic infrastructure, and consistently policy between district government and central government and among government institution.

Keywords: investment gap, decentralized policy, expansion regional, regional economic

Abstrak: Kebijakan desentralisasi memberikan beberapa dampak positif pada perekonomian daerah. Provinsi Papua adalah salah satu kabupaten yang menggunakan kebijakan desentralisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan investasi asing dan domestik di beberapa provinsi di Indonesia, untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesenjangan investasi asing dan domestik antarprovinsi di Indonesia dan faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis trend, analisis regresi dan kesenjangan investasi asing dan domestik antarprovinsi di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan besar antara investasi Jawa dan Sumatera dengan wilayah lain di Indonesia. Disparitas investasi juga disebabkan oleh infrastruktur kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Saran dari penelitian ini untuk mempromosikan pemerataan pembangunan adalah bagaimana menciptakan keadaan yang kondusif dengan kebijakan ekonomi yang komprehensif dan dengan dukungan stabilitas sosial politik, infrastruktur ekonomi yang cukup, dan kebijakan yang konsisten antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan antarinstitusi pemerintah.

Kata kunci: kesenjangan investasi, kebijakan desentralisasi, pemekaran wilayah, ekonomi regional

PENDAHULUAN

Kebijakan pemekaran wilayah menjadi sorotan banyak kalangan menyusul maraknya tuntutan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Kondisi ini wajar mengingat efektivitas kebijakan pemekaran wilayah untuk men-

dorong pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah, bahkan dalam beberapa kasus anggaran daerah (APBD) lebih banyak terserap untuk membiayai pengeluaran rutin yaitu gaji pegawai negeri dan tunjangan pejabat daerah. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dengan menerapkan formula *trickle down*

effect ternyata menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu. Kue pembangunan hanya dinikmati segelintir orang saja dan menyisakan banyak kemiskinan karena praktek monopoli dan oligopolistik yang dipaksakan dan tanpa aturan main yang adil.

Cita-cita untuk mewujudkan tatanan pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil menemui momentumnya dengan berakhirnya orde baru setelah diterjang badai krisis moneter dan ekonomi yang cukup kuat. Semangat reformasi juga bergulir di seluruh pelosok tanah air yaitu dengan berkembangnya tuntutan otonomi daerah untuk meningkatkan peran dan wewenang daerah dalam mengelola potensi ekonominya.

Semangat otonomi daerah tidak lepas dari orientasi kebijakan pembangunan selama pemerintahan orde baru yang hanya terfokus pada wilayah di pulau Jawa terutama di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sehingga pusat pertumbuhan ekonomi bertumpu pada wilayah di pulau Jawa sementara daerah lainnya jauh tertinggal. Para investor lebih tertarik menanam investasi di pulau Jawa khususnya di Jabodetabek karena sarana dan prasarana ekonomi lengkap sehingga lebih menguntungkan daripada menanam investasi di daerah yang kurang mendukung baik dari ketersediaan infrastruktur ekonomi maupun sumber daya manusia (SDM).

Memang tidak bisa dibantah bahwa wilayah Indonesia bagian barat terutama di Jawa dan Bali merupakan wilayah yang mempunyai keunikan dari aspek SDM dibandingkan wilayah lain di Indonesia terutama Indonesia bagian timur. Keadaan ini merupakan realitas yang sudah ada sejak zaman kerajaan di mana

kerajaan besar di Indonesia sebagian besar berdomisili di Jawa. Kemegahan Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan bukti sejarah kekuatan budaya dan SDM yang ada di Jawa dan sekitarnya. Kesenjangan prasarana dan sarana ekonomi berdampak pada kesenjangan ekonomi antarwilayah dan daerah di Indonesia sebagaimana tampak pada *Tabel 1*.

Dari *Tabel 1* dapat diketahui bahwa terjadi divergensi kontribusi ekonomi antara Jawa dan luar Jawa sejak tahun 2000 serta adanya peningkatan kontribusi dari wilayah Jawa. Kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi lebih ditekankan di Jawa untuk kepentingan pemerintahan dan kelancaran arus produksi serta distribusi barang. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi memang sejak awal telah terjadi kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa. Kontribusi ekonomi Sumatera cenderung mengalami penurunan sejak krisis ekonomi tahun 1999 sebesar 22,60 persen menjadi 20,84 persen pada tahun 2003. Namun keadaan sebaliknya terjadi di Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan dari 59,72 persen pada tahun 1999 menjadi 61,76 persen. Sementara untuk pulau-pulau lainnya relatif kontribusinya tetap. Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) namun dalam kenyataan justru kawasan barat Indonesia (KABARIN) menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat.

Kesenjangan ekonomi antardaerah juga terlihat dari kesenjangan investasi merupakan prasyarat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Karena melalui investasi akan meningkatkan kapasitas pembangunan

Tabel 1. Distribusi Pendapatan Spasial di Indonesia (%)

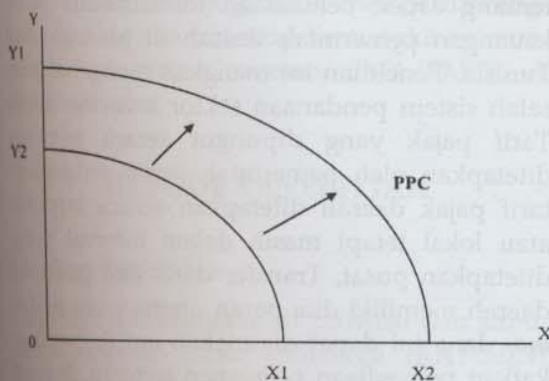
Pulau dan Kawasan	1999	2000	2001	2002	2003
Sumatera	22,60	21,40	21,18	21,05	20,84
Jawa dan Bali	59,72	60,54	60,66	61,54	61,76
Kalimantan	9,72	10,03	9,96	9,48	9,35
Sulawesi	4,47	4,41	4,46	4,49	4,49
Pulau lainnya	3,49	3,63	3,74	3,44	3,56
Kawasan Barat Indonesia	82,32	81,93	81,84	82,59	82,61
Kawasan Timur Indonesia	17,68	18,07	18,16	17,41	17,39
INDONESIA	100	100	100	100	100

Sumber: Statistik Indonesia 2004, BPS

dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi. Agar roda pembangunan dapat berjalan, maka perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi para investor untuk menanam investasinya baik investor domestik (PMDN) maupun investor asing (PMA).

Fenomena pemekaran wilayah di beberapa daerah - khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) - sekarang seakan mencerminkan euforia ekonomi politik pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah yang selama ini tersumbat. Permasalahannya betulkah kebijakan pemekaran wilayah merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah atau hanya kepentingan elit politik semata. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah dampak kebijakan pemekaran wilayah di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN) membawa implikasi positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

State of the Art. Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun di samping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kegiatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional yang digambarkan dengan pergeseran ke kanan atas kurva PPC sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kurva PPC

Kajian tentang pentingnya peranan investasi dalam pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi seperti yang dikemukakan Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Rostow mengemukakan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi negara-negara melalui tahapan-tahapan pembangunan sebagai berikut yaitu tahap masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tahap lepas landas, menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi. Masa yang krusial bagi proses pembangunan suatu negara adalah pada tahap prasyarat tinggal landas menuju tahap lepas landas, karena pada masa itu merupakan proses pembentukan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang akan menentukan tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Kemudian pandangan Ranis dan Fei tentang teori pertumbuhan ekonomi juga mensyaratkan adanya kegiatan investasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Demikian juga dalam teori Nelson yang mensyaratkan adanya tingkat penanaman modal yang tinggi agar masyarakat dapat terlepas dari *the low level equilibrium trap*. Untuk mendorong peningkatan penanaman modal perlu dilakukan dengan meningkatkan tabungan masyarakat. Dalam menganalisis mengenai fenomena kemiskinan di negara-negara dunia ketiga.

Nurkse mengungkapkan bahwa suatu negara miskin karena negara itu miskin (*a country is poor because it is poor*). Untuk mengatasi persoalan lingkaran kemiskinan (*the vicious circles*), maka harus diputus dengan adanya suatu langkah untuk terciptanya pembentukan modal (*capital forming*) yang tinggi. Jadi dari pandangan para ahli ekonomi pembangunan di atas dapat diketahui pentingnya kegiatan investasi atau penanaman modal untuk mendorong kegiatan ekonomi.

Fenomena perubahan-perubahan variabel ekonomi dalam struktur perekonomian dijelaskan dalam struktur model makroekonomi pada perekonomian terbuka sebagaimana dikembangkan dalam model Mundell-Fleming standar dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C(Y^d) + I(r) + G + X(EP^x / P^d) - \frac{EP^m}{P^d} \cdot IM\left(Y^d, \frac{EP^m}{P^d}\right) \quad (1)$$

$$Y^d = P^d Y / P; \quad (2)$$

$$P = \gamma P^d + (1 - \gamma) EP^m; \quad (3)$$

$$P.L(Y, r) = D + R \quad (4)$$

$$\dot{R} = P^d \left[X \left(\frac{EP^x}{P^d} \right) - \frac{EP^m}{P^d} \cdot IM \left(Y^d, \frac{EP^m}{P^d} \right) \right] + K \left(r - r^f - \frac{\dot{E}}{E} \right) \quad (5)$$

$$Y = F(N); \quad (6)$$

$$\bar{W} = P^d \cdot F_N(N) \quad (7)$$

dimana: Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, r adalah tingkat bunga dalam negeri, r^f adalah tingkat bunga luar negeri, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, IM adalah Impor, P^d adalah tingkat harga domestik, D adalah jumlah obligasi pemerintah, R adalah jumlah cadangan devisa pada sistem kurs tetap, E adalah jumlah cadangan devisa pada sistem kurs fleksibel, W adalah tingkat upah nominal, N adalah jumlah tenaga kerja, γ adalah kecenderungan rata-rata pembelian (*averages propensity to spend*) barang-barang domestik dan barang impor, K adalah nilai *capital inflow*, EP^x adalah nilai tukar barang-barang ekspor, EP^m adalah nilai tukar barang-barang impor.

Persamaan (1) merupakan persamaan yang menunjukkan suatu syarat keseimbangan antara permintaan dan penawaran untuk produksi domestik dengan tingkat harga P^d . Barang-barang yang dihasilkan dibeli baik oleh konsumen domestik, pemerintah, atau diekspor. Karena C , I , dan G merupakan pengeluaran total dari produksi domestik maupun impor sehingga untuk menghindari terjadinya pencatatan permintaan ganda, maka besarnya impor (IM) harus dikurangkan dari persamaan tersebut. Karena barang-barang impor dan domestik merupakan barang yang berbeda, maka nilai barang-barang impor harus dikurangkan dari persamaan tersebut. Jika impor barang dikalikan dengan harga dunia, P^m , maka akan menunjukkan besarnya nilai tukar dalam satuan unit. Nilai tukar, E , menunjukkan besarnya harga mata uang domestik per satu unit mata

uang luar negeri, sehingga EP^m/M mengukur besarnya impor dalam satuan mata uang domestik. Akhirnya dengan membagi dengan harga domestik P^d maka nilai impor menunjukkan besarnya barang-barang yang diproduksi secara fisik di dalam negeri dan diasumsikan bahwa impor merupakan barang dan jasa final.

Dalam konteks desentralisasi fiskal bahwa produk barang domestik adalah merupakan barang yang dihasilkan di suatu daerah. Sehingga interaksi ekonomi antardaerah akan memberikan implikasi kepada munculnya lalu lintas barang antardaerah dengan segala implikasinya. Domain perdagangan di era otonomi daerah menjadi semakin kompleks yang melibatkan persaingan perdagangan baik antardaerah maupun antarnegara.

Penelitian tentang desentralisasi fiskal juga dilakukan oleh Anwar Shah (1995) yang mengambil obyek penelitian di Indonesia dan Pakistan. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia mengambil pengalaman di era orde baru dampak yang ditimbulkan atas sistem fiskal yang sangat sentralistik. Kebijakan otonomi daerah memberi ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri. Indonesia telah mengkombinasikan proses perencanaan *bottom up* dan *top down*. Proses yang sama telah melemahkan jaminan otonomi fiskal ke daerah melalui transfer fiskal dengan tujuan umum (*general purpose grants*). Kondisi keuangan daerah di Pakistan menunjukkan fakta yang sama dimana transfer besar untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal mengandung potensi terbentuknya insentif yang merugikan.

Francois Vaillancourt (1996) melalui kajian tentang aspek pendanaan infrastruktur pada keuangan pemerintah daerah di Maroko dan Tunisia. Penelitian ini mengkaji mengenai masalah sistem pendanaan sektor investasi lokal. Tarif pajak yang dipungut secara terpusat ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan tarif pajak daerah ditetapkan secara terpusat atau lokal tetapi masih dalam interval yang ditetapkan pusat. Transfer dana dari pusat ke daerah memiliki dua peran utama yaitu *pertama*, dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan tertentu dimana daerah tidak mampu memenuhi secara baik.

Kedua, dana ini digunakan untuk pemerataan potensi pajak di antara pemerintah-pemerintah daerah.

Edy Suandi Hamid (2005) melakukan penelitian tentang formula alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai upaya mengatasi ketimpangan fiskal dalam otonomi daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini menyangkut ketimpangan fiskal vertikal telah mengakibatkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang tidak sehat dimana ketergantungan pemerintah daerah menjadi tinggi terhadap pemerintah pusat. Pada sisi lain ketimpangan fiskal horisontal yang berdampak pada ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal sudah cukup tinggi dari sisi pengeluaran namun dari sisi penerimaan ternyata belum merubah pola hubungan yang telah ada. Daerah kabupaten dan kota semakin tinggi ketergantungannya dengan penerimaan PAD serta mengalami kesulitan karena sumber-sumber penerimaan yang penting dikuasai oleh pemerintah pusat.

Jadi mengkaji hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat aspek orijinalitas dari penelitian tentang penyusunan model Dana Alokasi Pemekaran Wilayah (DAPW) untuk mengatasi ketimpangan investasi PMA/PMDN dan ketimpangan fiskal sebagai dampak kebijakan pemekaran wilayah di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) untuk mewujudkan keadilan ekonomi nasional. Aspek yang belum dikaji dari penelitian Edy Suandi Hamid yang menjadi salah acuan dalam penelitian ini yaitu tidak memasukkan aspek kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya. Demikian juga tidak mempertimbangkan implikasinya terhadap kemungkinan munculnya kesenjangan investasi PMA/PMDN di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi dan kabupaten kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah. Untuk mempertajam hasil penelitian se-

hingga lebih fokus pada topik dan tujuan penelitian, maka lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada daerah yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah dan akan melakukan kebijakan pemekaran wilayah. Lingkup penelitian ini yaitu daerah yang termasuk dalam wilayah Indonesia bagian timur meliputi kawasan di pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), kepulauan Maluku, dan Papua. Khusus untuk penelitian tentang penyusunan model Dana Alokasi Pemekaran Wilayah (DAPW) lingkup penelitian hanya dibatasi pada kabupaten/provinsi yang akan melakukan kebijakan pemekaran wilayah saja dalam tahun 2010.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel. Di samping itu untuk mendukung kedalaman analisis penelitian ini juga mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan penelitian lain yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi data mengenai jumlah penduduk, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak, pajak penghasilan, pendapatan asli daerah (PAD), indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB, indeks konstruksi daerah, tingkat kemiskinan, tingkat kematian bayi, tingkat kelahiran bayi, investasi PMA, investasi PMDN, dan pengeluaran rumah tangga.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi dan kompilasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan laporan realisasi pembangunan daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Bappeda, dan kantor-kantor dinas yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perekonomian di Provinsi Papua

(1) Latar Belakang Sejarah dan Kondisi Geografis. Provinsi Papua merupakan provinsi paling ujung timur dan berbatasan dengan Papua Nugini. Provinsi Papua dahulu disebut Irian Barat dan pada masa pemerintahan Soeharto

dirubah menjadi Irian Jaya. Pada masa reformasi tahun 2002 dirubah lagi menjadi provinsi Papua. Melalui perdebatan yang panjang kemudian provinsi Papua dimekarkan menjadi provinsi Papua yang terletak di sebelah timur dan provinsi Irian Jaya Barat, sekarang disebut Papua Barat. Ibukota provinsi Papua adalah Jayapura dan merupakan provinsi yang menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah dan sangat menjanjikan bagi pengembangan sektor pertambangan, sektor pertanian, industri dan jasa. Luas wilayah daratan 41.480.000 ha dan lautan 228.000 ha. Curah hujan sebanyak 1.800-3.000 mm per tahun dengan suhu udara antara 19-28^o C dan tingkat kelembaban 80 persen. Batas wilayah provinsi Papua sebelah utara dengan lautan Pasifik, selatan dengan Samudera Indonesia dan Australia, sebelah timur dengan Papua Nugini dan sebelah Barat dengan Papua Barat dan Maluku. Masyarakat Papua terdiri dari kurang lebih 255 suku dengan adat dan bahasa yang berbeda-beda.

(2) Keadaan Ekonomi. Struktur perekonomian di provinsi Papua ditinjau dari kontribusi sektor-sektor ekonomi lebih banyak di topan oleh sektor pertanian, pertambangan dan jasa. Sedangkan peranan sektor lainnya seperti industri, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan relatif masih sedikit. *Tabel 2* menjelaskan struktur ekonomi provinsi Papua. Angka pada *Tabel 2* menunjukkan bahwa struktur ekonomi Papua didominasi sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perdagangan besar, ecer-

an, rumah makan, dan hotel. Kontribusi sektor ekonomi paling besar ADHB tahun 2006 adalah sektor pertanian sebesar Rp5.144.704,89 juta dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 5.529.850,44 juta. Sedangkan sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel ADHB tahun 2006 sebesar Rp2.083.578,73 juta. Pada tahun 2007 dengan periode yang sama meningkat menjadi Rp2.459.999,57 juta. Dengan basis perhitungan ADHK nilai kontribusi sektor pertanian tahun 2006 sebesar 3.220.813,93 juta dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 3.239.642,68 juta. Sedangkan sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel tahun 2006 sebesar Rp1.119.096,59 juta. Pada tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar Rp1.227.526,36 juta.

(3) Investasi di Papua. Peranan investasi sangat vital dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Aktivitas investasi di Papua mengalami pasang surut pascakebijakan pemekaran wilayah. Nilai investasi bisa dilihat dari besarnya investasi menurut sektor-sektor ekonomi dan juga bisa dianalisis berdasarkan sifat atau asal investasi yang telah disetujui pemerintah baik PMDN maupun PMA. Data tentang nilai investasi PMDN provinsi Papua dimulai tahun 2002 mengingat konsistensi data dengan provinsi lainnya yang diambil dari laporan BPS. Sebelum tahun 2002 data tentang investasi PMA/PMDN provinsi Papua dijadikan satu dengan provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, sehingga menyulitkan untuk melakukan

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua, Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2006	2007	2006	2007
Pertanian	5.144.704,89	5.529.850,44	3.220.813,93	3.239.642,68
Pertambangan dan Penggalian	138.195,86	172.619,88	9.846.663,52	9.903.030,32
Industri Pengolahan	836.832,41	896.875,17	482.571,65	476.966,42
Listrik, Gas dan Air Bersih	80.745,36	89.277,09	41.784,61	44.284,08
Bangunan	1.929.556,28	2.579.329,33	1.036.367,17	1.216.806,85
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel	2.083.578,73	2.459.999,57	1.119.096,59	1.227.526,36
Pengangkutan dan Komunikasi	1.821.102,30	2.244.085,54	1.013.610,74	1.170.527,97
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	506.050,53	820.177,22	301.594,74	443.830,11
Jasa-jasa	2.243.762,74	2.689.735,99	1.326.376,30	1.453.465,37
Jumlah	14.784.529,11	17.481.950,22	18.388.879,26	19.176.080,16

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel 3. Nilai Investasi PMDN yang Disetujui Pemerintah di Papua (Miliar rupiah)

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investasi	176,5	995,9	44	1.607,8	531,3	19.840,4

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi

analisis lebih lanjut khusus untuk provinsi Papua saja. Nilai PMDN yang telah disetujui pemerintah di provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah nilainya cukup besar. Keadaan ini bisa dipahami mengingat nilai investasi untuk sektor ekonomi pertambangan dan penggalian di Papua cukup besar. Keberadaan tambang emas dan tembaga PT Freeport mendorong aktivitas ekonomi lainnya sehingga memberi efek pengganda (*multipplier effect*) pada perekonomian di Papua. Nilai investasi PMDN tahun 2002 sebesar 176,5 miliar rupiah dan meningkat tajam pada tahun 2003 menjadi 995,9 miliar rupiah. Namun pada tahun 2004 turun menjadi 44 miliar rupiah dan nilai investasi PMDN tahun 2005 meningkat lagi menjadi 1607,8 miliar rupiah. Keadaan ini terus meningkat sampai dengan tahun 2007 yang nilainya cukup besar yaitu 19840,4 miliar rupiah. Secara umum iklim investasi di Papua cukup menggembirakan mengingat potensi ekonomi cukup besar terutama sektor pertambangan dan penggalian. Masuknya investasi di Papua mendorong masuknya barang, jasa dan manusia ke Papua dalam jumlah yang terus meningkat. Namun ada persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Papua yaitu keamanan di Papua. Gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) berpotensi mengganggu pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Papua. Dari data di atas terlihat bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Papua berdampak positif bagi peningkatan investasi PMDN.

Sedangkan nilai investasi PMA di Papua juga relatif tidak jauh beda dengan investasi PMDN. Secara umum kondisi perekonomian di Papua sangat menjanjikan bagi investor untuk menanam modal mengingat potensi keuntungan yang besar terutama dari sektor pertam-

ban dan penggalian. Nilai investasi PMA dari tahun 2002 sampai tahun 2007 relatif stabil dengan nilai investasi paling rendah sebesar 13,7 miliar rupiah pada tahun 2005 dan terbesar pada tahun 2003 sebesar 220,8 miliar rupiah. Tabel 4 menjelaskan perkembangan investasi PMA di Papua dari tahun 2002 sampai 2007.

Tabel 4. Nilai Investasi PMA yang Disetujui Pemerintah di Papua (Miliar rupiah)

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investasi	76,5	220,8	49,6	13,7	121,5	98,8

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi

Berbeda dengan investasi PMDN yang relatif nilainya kecil, tetapi untuk nilai PMA nilainya ada stabil dari tahun ke tahun. Tabel 4.30 di atas mengungkapkan nilai PMA di provinsi Papua dari tahun 2002 sebesar 76,5 miliar rupiah. Tahun 2003 nilai investasi melonjak menjadi 220,8 miliar rupiah. Meningkatnya investasi PMA di Papua tidak lepas dari keberadaan PT Freeport sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Papua. Pembangunan jaringan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan alat-alat penunjang aktivitas ekonomi lainnya menjadi faktor penting meningkatnya investasi di Papua. Masuknya investasi asing di Papua mendorong perkembangan ekonomi domestik seperti sektor perdagangan, persewaan dan jasa. Nilai investasi PMA relatif mengalami peningkatan sampai tahun 2007 dimana nilai investasi PMA tahun 2007 sebesar 98,8 miliar rupiah setelah sebelumnya pada tahun 2006 nilainya sebesar 121,5 miliar rupiah. Ancaman gangguan keamanan dari OPM merupakan kendala utama untuk mendorong investasi di Papua. Kasus penembakan di PT Freeport menjadi indikasi bahwa keamanan di Papua belum sepenuhnya kondusif. Dari data tersebut terlihat bahwa kebijakan pemekaran wilayah pro-

vinsi Papua berdampak signifikan terhadap peningkatan investasi PMA

(4) Analisis Kesenjangan Investasi PMDN di Papua. Pemekaran wilayah provinsi Papua pada tahun 2002 membawa perubahan yang sangat berarti baik pada perekonomian di Papua khususnya menyangkut upaya untuk mendorong iklim investasi baik PMA maupun PMDN. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan investasi, maka perlu dianalisis dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n} \quad (8)$$

dimana: r adalah Tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi - i , I_i adalah nilai investasi PMDN di provinsi - i , I adalah nilai investasi PMDN total, f_i adalah jumlah penduduk di provinsi - i , n adalah jumlah total penduduk.

Analisis kesenjangan investasi PMDN di sini adalah nilai investasi PMDN yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan investasi PMDN di Papua ditinjau dan dibandingkan dalam lingkup perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) maupun kawasan kepulauan Maluku dan Papua. Dalam analisis regional investasi di provinsi Papua dibandingkan dengan perekonomian di Maluku dan Papua disesuaikan dengan ketersediaan data dan konsistensi dengan analisis sebelumnya. Analisis kesenjangan investasi PMDN di Maluku Utara dalam lingkup perekonomian di kawasan Maluku dan Papua dapat dilihat pada Tabel 5.

Hasil analisis kesenjangan (gap) investasi PMDN provinsi Papua yang disetujui pemerintah menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam konteks perekonomian di Maluku dan Papua. Kesenjangan (gap) investasi PMDN dilihat dalam kaitan dengan nilai investasi PMDN provinsi Papua dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh provinsi di Papua dan Maluku. Kesenjangan (gap) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Papua dibandingkan dengan total investasi di Maluku dan Papua ditunjukkan dengan nilai pada kolom $(I_i - I)$. Secara umum kesenjangan (gap) investasi PMDN di Papua dibandingkan dengan investasi di tingkat kawasan Maluku dan Papua relatif stabil. Kondisi terlihat pada Tabel 5 dimana angka kesenjangan relatif tidak terlalu besar. Pada tahun 2002 besarnya kesenjangan (gap) sebesar -128,5, kemudian pada tahun 2003 besarnya gap turun menjadi -52,9 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Papua menjadi provinsi Papua dan Papua Barat relatif berpengaruh secara signifikan meskipun tidak terlalu besar. Kesenjangan (gap) investasi relatif berfluktuasi sampai tahun 2007 dimana besarnya kesenjangan pada tahun 2004 naik menjadi -140,1 dan turun lagi menjadi -121,1 pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 meningkat tajam menjadi -823,6. Secara umum kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Papua dalam jangka pendek dan menengah relatif kesenjangan menurun namun dalam jangka panjang cenderung ada peningkatan.

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai

Tabel 5. Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Provinsi Papua dalam Konteks Perekonomian Maluku dan Papua

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	f_i	n	f_i/n	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2002	-128,5	16512,25	2309400	4269000	0,54096978	8932,628
2003	-52,9	2798,41	2358800	4351000	0,54212825	1517,097
2004	-140,1	19628,01	2409300	4434700	0,54328365	10663,58
2005	-121,1	14665,21	2460700	4519900	0,5444147	7983,956
2006	-5	25	2506800	4599200	0,54505131	13,62628
2007	-823,6	678316,96	2553800	4680100	0,5456721	370138,6

Sumber: BPS, (diolah)

Keterangan: r adalah tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Papua, I_i adalah nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Papua, I adalah nilai investasi PMDN total di Maluku dan Papua, f_i adalah jumlah penduduk di provinsi Papua, dan n adalah jumlah total penduduk di Maluku dan Papua

kesenjangan investasi di provinsi Papua, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesenjangan investasi PMDN (r) yang mengukur besarnya investasi PMDN di provinsi Papua dibandingkan dengan nilai investasi total di Maluku dan Papua dikaitkan dengan jumlah penduduk. Rasio kesenjangan investasi PMDN (r) di provinsi Papua pascakebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2002 relatif stabil ditunjukkan dengan nilai r sebesar 8932,628. Kemudian pada tahun 2003 rasio kesenjangan investasi PMDN turun menjadi 1517.097. Pada tahun 2004 naik relatif tajam menjadi 10663,58 dan menurun pada tahun 2005 menjadi 7983,956 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Papua dalam jangka pendek dan menengah berpengaruh terhadap fluktuasi rasio kesenjangan investasi PMDN.

Untuk lebih melengkapi informasi mengenai dampak kebijakan pemekaran wilayah provinsi Papua, maka perlu dianalisis kesenjangan investasi PMDN provinsi Papua dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN). Kawasan timur Indonesia (KATIMIN) di sini meliputi pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Maluku Utara, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat. Tabel 6 menunjukkan besarnya nilai kesenjangan investasi PMDN di Papua yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa kesenjangan (gap) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Papua dibandingkan

dengan keseluruhan investasi PMDN di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yaitu pada kolom ($I_i - I$). Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kesenjangan (gap) PMDN di Papua dalam konteks perekonomian di KATIMIN mengalami fluktuasi. Kesenjangan (gap) investasi PMDN pada tahun 2002 sebesar -3614,6 dan pada tahun 2003 meningkat tajam menjadi -29973,8 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan peningkatan kesenjangan (gap) investasi PMDN. Namun pada periode berikutnya yaitu tahun 2004 mengalami penurunan kesenjangan yang sangat tajam yaitu menjadi -3000,1 artinya dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan investasi regional di Papua mempunyai dampak setelah berjalan beberapa waktu. Tahun 2005 relatif stabil menjadi -4189,6 artinya kebijakan pemekaran wilayah berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di provinsi Papua maupun secara regional di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

Analisis kesenjangan investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Papua menjadi jelas dengan melihat rasio r yang menunjukkan kesenjangan investasi dikaitkan dengan jumlah penduduk. Rasio kesenjangan investasi PMDN di Papua dalam konteks analisis kesenjangan investasi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) pada tahun 2002 sebesar 1091231. Pada tahun 2003 nilai r naik cukup besar menjadi 75488043, namun pada tahun 2004 rasio kesenjangan investasi PMDN di Papua turun menjadi 760802,2. Pada tahun 2005 naik lagi

Tabel 6. Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Provinsi Papua dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	f_i	n	f_i/n	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2002	-3614,6	13065333,16	2309400	27650500	0,083521	1091231
2003	-29973,8	898428686,40	2358800	28073500	0,084022	75488043
2004	-3000,1	9000600,01	2409300	28503000	0,084528	760802,2
2005	-4189,6	17552748,16	2460700	28938700	0,085031	1492536
2006	-4859,5	23614740,25	2506800	29341400	0,085436	2017539
2007	-8683,9	75410119,21	2553800	29749800	0,085843	6473400

Sumber : BPS, (Diolah)

Keterangan: r adalah tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Papua, I_i adalah nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Maluku Utara, I adalah nilai investasi PMDN total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN), f_i adalah jumlah penduduk di provinsi Papua, n adalah jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

menjadi 1492536 dan angka rasio kesenjangan relatif stabil sampai tahun 2007 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Papua mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kondisi lokal di daerah pemekaran dan dalam jangka menengah rasio kesenjangan investasi relatif stabil.

SIMPULAN

Kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Papua di satu sisi memberikan iklim politik yang positif untuk merespon keinginan masyarakat Papua untuk bisa mengelola perekonomian sendiri. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan SDA di tengah minimnya kualitas infrastruktur dan SDM, sehingga menimbulkan persoalan kesenjangan ekonomi dan pendapatan di masyarakat. Kesenjangan investasi domestik (PMDN) menjadi indikasi perlunya kebijakan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarkelompok di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan persyaratan mutlak untuk mengatasi permasalahan kesenjangan investasi PMDN dan persoalan kesenjangan ekonomi di provinsi Papua sebagai dampak dari kebijakan pemekaran wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alun, Tawang. 1992. *Analisis Ekonomi Utang Luar Negeri*. Jakarta: LP3ES.
- Anwar, Arsyad. 1985. *Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986*, edisi pertama. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sinar Harapan.
- Arif, Sritua. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik*, kumpulan Karangan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Boediono. 1979. *Econometric Models of The Indonesian Economy for Short Run Policy Analysis*. Disertation Ph.D. University of Pennsylvania.
- Branson, William H. 2000. *Macroeconomic Theory and Policy*, third edition. New York: Harper and Row Publisher.
- Dernburg, Thomas F. 2001. *Makroekonomi*, terjemahan Muhtar, edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dornbusch, Rudiger dan Fischer Stanley. 2002. *Makroekonomi*, terjemahan Sitompul, edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Glassburner, Bruce dan Chandra Aditiawan. 1982. *Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro*. edisi kedua. Jakarta: LP3ES.
- Granger, CWJ and Newbold, Paul. 2002. *Forecasting Economic Time Series*. New York: Academic Press. p. 333
- Gujarati, Damodar N. 2002. *Basic Econometrics*. fifth edition, London: McGraw-Hil.
- Hadiwijoyo, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Jilid I dan II. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid, Edy Suandi. 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Henderson, James M, Quandt Richard E. 1980. *Microeconomic Theory a Mathematical Approach*, third edition, International Student Edition. New York: McGraw-Hill International Book Company.
- Hill, Hall. 1996. *The Indonesian Economic since 1966 Southeast Asia's Emerging Giant*. London: Cambridge University Press.
- IMF. 1998. *World Economic Outlook*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Insukendro. 1992. Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, tahun VII, No. 1.
- Insukendro. 1996. Pendekatan Masa Depan dalam Penyusunan Model Ekonometrika: Forward-looking Model dan Pendekatan Kointegrasi. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, tahun kedua, edisi kedua.
- Insukendro. 1990. Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi Studi Kasus Impor Barang di Indonesia. *Journal*

- Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V.
- Insukendro. 1998. Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 1
- Insukendro. 1998. Pendekatan Stok Penyangga Permintaan Uang: Tinjauan Teoritik dan Sebuah Studi Empirik di Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVI, No. 4
- Intriligator, Michael D. 1996. *Econometric Models, Techniques and Application*. New Jersey USA: Prentice-Hall Inc.
- Kmenta, Jan. 2000. *Elements of Econometric*, second edition, London: McGraw-Hill.
- Koutsoyiannis, A. 2002. *Theory of Econometric*, second edition. New Jersey: Prentice-Hall.
- Lilien, David M. 1976. *Micro TSP Student Version Used's Manual Version 5.1, Quantitative Micro Software*. California: Irvin.
- M. Nasir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maddala, GS. 2001. *Introduction to Econometrics*, second edition. New York: Maxwell Macmillan International Publishing Company.
- Malinvaud, E. 1999. *Statistical Methods of Econometrics*, third revised edition. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
- Mankiw, G N. 2000. *Macroeconomics*. New York: Worth Publisher Co.
- Nopirin. 1983. A Synthesis of Monetary and Keynesian Approach to the Balance of Payments The Indonesian Case 1970-1979, Ph.D dissertation, Washington State University, 1983, Unpublished.
- Peursen van CA. 1993. *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pindyck, Robert S and Rubinfeld, Daniel L. 1991. *Econometric Model and Economic Forecast*, International edition, third edition. New York: McGraw-Hill Inc.
- Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Romer, David. 2000. *Advanced Macroeconomics*. Singapore: McGraw Hill International Editions.
- Sadoulet Elisabeth and Alain de Janvry. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Scarth, William M. 1988. *Macroeconomics An Introduction to Advanced Methods*. Florida: Harcourt Brace.
- Soewardi, Herman. 2000. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru tentang Timbul-tenggelamnya Sivilisasi*, edisi I. Bandung: Bakti Mandiri.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: LP3ES.
- Thomas, R Leighton. 1985. *Introductory Econometrics Theory and Application*, first edition, Singapore: British Library.
- Turnovsky, Stephen J. 1981. *Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy*. USA: Cambridge University Press.
- Wihana Kirana Jaya. 1990. Seleksi Model Permintaan Uang di Indonesia 1973-1983. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Analisis Makroekonomi Indonesia Pendekatan IS-LM*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yuliadi, Imamudin. 2006. *Analisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia Periode 1990.I - 2004.IV*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Zhang, Zhaoyong. 1999. China's Exchange Rate Reform and Its Impact on The Balance of Trade and Domestic Inflation. *Asia Pacific Journal of Economics and Business*, vol. 3 No. 2, December.